



KKP  
**2026**  
#GROWSTRONGER

# LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL  
PERIKANAN TANGKAP



2026

TRIWULAN I



**LOTHARIA LATIF**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2026 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi kinerja Ditjen Perikanan Tangkap kepada instansi terkait dan publik sebagaimana berpedoman pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap secara aktif mengawal implementasi kebijakan Ekonomi Biru, dengan program Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang berfokus pada transformasi tata kelola perikanan berbasis keberlanjutan sumber daya alam, sesuai dengan potensi

sumber daya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Program ini merupakan kontribusi nyata mewujudkan Asta Cita, yakni kemandirian bangsa melalui penguatan ketahanan pangan nasional (swasembada pangan).

Kami mengapresiasi dukungan yang telah diberikan berbagai instansi, pemangku kepentingan, dan seluruh lapisan masyarakat terhadap upaya pencapaian kinerja Ditjen Perikanan Tangkap. Semoga kerja sama yang terjalin dapat terus ditingkatkan, sejalan dengan upaya mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara modern, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Kami mengharapkan tanggapan maupun saran yang membangun. Semoga melalui Laporan Kinerja ini, peran strategis seluruh jajaran serta pemangku kepentingan semakin meningkat untuk dapat mendukung kinerja pembangunan perikanan tangkap di masa mendatang. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Jakarta, 24 April 2026

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap,



**Ditandatangani  
Secara Elektronik**

**Lotharia Latif**

# RINGKASAN EKSEKUTIF

---

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam rencana kinerjanya memfokuskan dukungan pada kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diimplementasikan dalam bentuk sasaran kinerja pada setiap tahunnya. Sasaran kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) mengacu kepada Sasaran Strategis (SS) KKP. Untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut, pada tahun 2026 DJPT menetapkan 5 (lima) Sasaran Program (SP) dengan 5 (lima) Indikator Kinerja tercantum dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. Guna mencapai Sasaran Program yang diharapkan, DJPT melakukan pemantauan pencapaian kinerja secara periodik.

Sampai dengan triwulan I atau awal tahun 2026, seluruh indikator kinerja telah dilakukan pengukuran. Berdasarkan pengukuran kinerja yang memanfaatkan aplikasi Kinerjaku (<https://kinerjaku.kkp.go.id/>), capaian Skor Kinerja Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Manajerial pada tahun 2026 adalah 109,22 atau masuk dalam kriteria Baik. Sebagian besar indikator kinerja pada tahun 2026 dapat tercapai melebihi target yang telah ditetapkan

Adapun dari sisi anggaran, berdasarkan aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) Kementerian Keuangan pada triwulan I tahun 2026, DJPT telah merealisasikan anggaran sebesar Rp107.792.769.853 atau mencapai 1,68% dari pagu sebesar Rp6.417.196.266.000. Dalam menjaga dan meningkatkan capaian kinerja pada periode selanjutnya, perlu dilakukan beberapa upaya seperti koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana aksi. Upaya koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan unit kerja di lingkungan KKP, K/L terkait serta pemangku kepentingan lainnya dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap jajaran di seluruh unit kerja lingkup DJPT. Komitmen dan tanggung jawab secara bersama seluruh pimpinan dan pegawai lingkup DJPT diharapkan dapat mendukung kinerja DJPT yang lebih baik lagi pada periode berikutnya.

# DAFTAR ISI

|                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| KATA PENGANTAR                                                                                    | i         |
| RINGKASAN EKSEKUTIF                                                                               | ii        |
| DAFTAR ISI                                                                                        | iii       |
| DAFTAR TABEL                                                                                      | v         |
| DAFTAR GAMBAR                                                                                     | vi        |
| <br>                                                                                              |           |
| <b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>                                                                         | <b>1</b>  |
| 1.1 LATAR BELAKANG                                                                                | 1         |
| 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN                                                                             | 2         |
| 1.3 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI                                                        | 2         |
| 1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN                                                                         | 3         |
| <br>                                                                                              |           |
| <b>BAB 2. PERENCANAAN KINERJA</b>                                                                 | <b>5</b>  |
| 2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029                                                           | 5         |
| 2.2 SASARAN, INDIKATOR, DAN TARGET KINERJA                                                        | 6         |
| 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026                                                                 | 6         |
| 2.4 RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA                                                                | 9         |
| <br>                                                                                              |           |
| <b>BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA</b>                                                               | <b>14</b> |
| 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI                                                                    | 14        |
| 3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA                                                                      | 15        |
| <i>Sasaran Program (SP-1): Kesejahteraan Nelayan Meningkat</i>                                    | 15        |
| <i>Sasaran Program (SP-2): Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan</i>            | 17        |
| <i>Sasaran Program (SP-3): Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Secara Berkelanjutan</i>       | 18        |
| <i>Sasaran Program (SP-4): Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Kelembagaan Ekonomi Nelayan</i> | 19        |

|                                                                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>Sasaran Program (SP-5): Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap</i> | 20        |
| <b>3.3 KINERJA ANGGARAN</b>                                                                                            | <b>22</b> |
| <b>BAB 4 PENUTUP</b>                                                                                                   | <b>25</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                                                                        | <b>26</b> |
| Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026                                                                                  | 27        |
| Data Nilai Tukar Nelayan Triwulan I Tahun 2026                                                                         | 30        |
| Data Volume Produksi Perikanan Tangkap Triwulan I Tahun 2026                                                           | 31        |

## DAFTAR TABEL

|   |                                                                                 |    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026                           | 9  |
| 2 | Capaian Indikator Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap Triwulan I Tahun 2026        | 14 |
| 3 | Capaian IKU “Nilai Tukar Nelayan (NTN)” Triwulan I Tahun 2026                   | 15 |
| 4 | Capaian IKU “Volume Produksi Perikanan Tangkap” Triwulan I Tahun 2026           | 18 |
| 5 | Indikator Komposit dan Capaian Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi DJPT      | 21 |
| 6 | Alokasi dan Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2026 Berdasarkan Jenis Kegiatan | 22 |
| 7 | Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja                                      | 23 |
| 8 | Alokasi Anggaran Berdasarkan Kewenangan                                         | 23 |
| 9 | Alokasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana                                        | 23 |

# DAFTAR GAMBAR

---

|   |                                                                      |    |
|---|----------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap            | 3  |
| 2 | <i>Dashboard</i> Aplikasi Kinerja DJPT Triwulan I Tahun 2026         | 14 |
| 3 | Grafik Pergerakan Gap $I_t$ dan $I_b$ Triwulan I Tahun 2025 dan 2026 | 16 |

---

# BAB 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya hayati laut yang melimpah serta menjadi salah satu pilar dalam ketahanan pangan nasional. Potensi sumber daya ikan Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 12 juta ton per tahun sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Potensi ini menjadi salah satu modal utama untuk mewujudkan visi pembangunan nasional yang tertuang dalam agenda kedua Asta Cita Presiden Republik Indonesia, yaitu penguatan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi tersebut secara berkelanjutan serta optimalisasi pembangunan nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerapkan pendekatan ekonomi biru (*blue economy*). Adapun program-program prioritas KKP dalam arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru meliputi (1) Penambahan Luas Kawasan Konservasi Laut; (2) Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota; (3) Pembangunan Budidaya Laut, Pesisir, dan Darat yang berkelanjutan; (4) Pengelolaan dan Pengawasan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan (5) Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) merupakan unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki mandat strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi Presiden Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berkaitan dengan program ekonomi biru yang diterapkan oleh KKP, DJPT mengampu salah satu program prioritas KKP yaitu Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam menjaga ekosistem dan sumber daya ikan serta sekaligus mendorong peningkatan ekonomi di sektor kelautan perikanan dengan cara optimalisasi potensi perikanan nasional dan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya perikanan. Diharapkan dengan adanya PIT maka sumber daya ikan dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk masyarakat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan daya dukung lingkungan sehingga dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan dan lestari. Kebijakan PIT juga merupakan suatu langkah nyata dalam mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional berbasis maritim sebagaimana tertuang pada agenda kedua Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Selain dukungan terhadap program prioritas KKP, DJPT terus melaksanakan program strategis lainnya dengan fokus pada keberlanjutan sumber daya ikan, peningkatan infrastruktur industri perikanan tangkap, produktivitas nelayan, serta kesejahteraan masyarakat nelayan. Keseluruhan kegiatan pengelolaan perikanan tangkap pada tahun 2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dengan tetap menjunjung

aspek akuntabilitas dan transparansi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja publik, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menyusun Laporan Kinerja (LKj) secara berkala. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun berjalan serta merupakan instrumen evaluatif untuk mengukur capaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, laporan ini diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan program di masa yang akan datang untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2026 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Ditjen Perikanan Tangkap. Adapun tujuan penyusunan LKj Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2026 untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dilaksanakan dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Ditjen Perikanan Tangkap untuk meningkatkan kinerjanya. Kemudian dirumuskan suatu simpulan atau rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan pembangunan perikanan tangkap ke depan.

## **1.3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri serta dipimpin oleh Direktur Jenderal, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

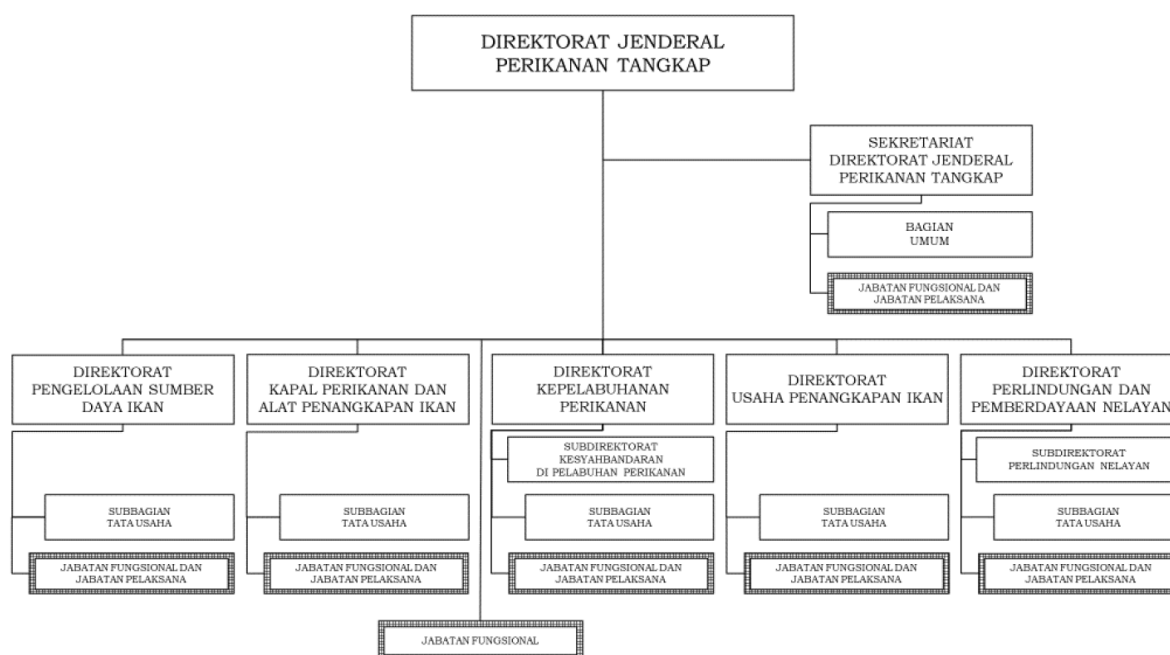
1. perumusan kebijakan di bidang standardisasi perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan, pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan perikanan, dan tata kelola pengawakan kapal perikanan, serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan, pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan perikanan, dan tata kelola pengawakan kapal perikanan, serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan, pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan perikanan, dan tata kelola pengawakan kapal perikanan, serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan, pengelolaan

- kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan perikanan, dan tata kelola pengawakan kapal perikanan, serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standarisasi perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan, pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan perikanan, dan tata kelola pengawakan kapal perikanan, serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Adapun susunan organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
2. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
3. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
4. Direktorat Kepelabuhanan Perikanan;
5. Direktorat Usaha Penangkapan Ikan; dan
6. Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tergambar pada bagan di bawah ini:



**Gambar 1.** Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

## 1.4. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj Ditjen Perikanan Tangkap Triwulan I Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### a. Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta

kendala- kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada triwulan mendatang.

**b. Bab I Pendahuluan**

Pada bagian ini disajikan informasi umum tentang Laporan Kinerja yang menjadi tanggung jawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama waktu tertentu (waktu pelaporan).

**c. Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK) pada periode triwulan yang tertentu.

**d. Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/ kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas - tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

**e. Bab IV Penutup**

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis serta strategi pemecahan masalah.

**f. Lampiran**

Isi dari pada lampiran merupakan Perjanjian Kinerja antara Dirjen Perikanan dan Menteri Kelautan.

## BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029. Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap memiliki peran strategis untuk mendukung fokus program utama presiden tersebut di bidang perikanan tangkap yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen perencanaan dengan berbagai upaya akselerasi pencapaian. Diharapkan pembangunan perikanan tangkap pada gilirannya mampu meningkatkan kontribusinya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan sumberdaya ikan yang berkelanjutan. Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi pembangunan perikanan tangkap ditetapkan sebagai berikut: “Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”. Visi tersebut merupakan prinsip utama yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam misi, strategi dan upaya- upaya pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan.

Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia**, melalui Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap;
2. **Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing**, melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan Tangkap;
3. **Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan**, melalui Peningkatan Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Tangkap;
4. **Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya**, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup DJPT.

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka tujuan pembangunan pembangunan perikanan tangkap adalah :

1. **Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap**, yaitu meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM perikanan tangkap, termasuk memberdayakan nelayan;
2. **Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan Tangkap**, yaitu:
  - a. Optimalisasi integrasi infrastruktur dan operasionalisasi pelabuhan perikanan;
  - b. Mengembangkan armada perikanan tangkap yang kompetitif dan produktif; Reformasi tata kelola perizinan usaha perikanan tangkap.

3. **Peningkatan Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Tangkap**, yaitu optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP);
4. **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup DJPT**, yaitu meningkatnya kinerja reformasi birokrasi DJPT secara berkualitas.

## 2.2. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Sasaran program pembangunan perikanan tangkap berdasarkan tujuan yang akan dicapai dengan masing-masing IKU sebagai berikut :

1. Sasaran program pertama (SP-1) yang akan dicapai adalah **“Kesejahteraan Nelayan Meningkat”**, dengan indikator kinerja: Nilai Tukar Nelayan;
2. Sasaran program kedua (SP-2) yang akan dicapai adalah **“Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Secara Berkelanjutan”**, dengan indikator kinerja: Volume produksi perikanan tangkap.
3. Sasaran program ketiga (SP-3) yang akan dicapai adalah **“Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan”**, dengan indikator kinerja: Persentase implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya ikan.
4. Sasaran program keempat (SP-4) yang akan dicapai adalah **“Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap”**, dengan indikator kinerja: Nilai implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

## 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2026, secara rinci sebagai berikut:



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN PERIKANAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Lotharia Latif**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA  
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Sakti Wahyu Trenggono**

PIHAK PERTAMA  
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Lotharia Latif**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

| SASARAN PROGRAM |                                                                                 | INDIKATOR KINERJA PROGRAM |                                                                                  | TARGET |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.              | Kesejahteraan Nelayan Meningkat                                                 | 1                         | Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks)                                               | 106    |
| 2.              | Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan                         | 2                         | Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang Berada pada Batas Biologis yang Aman (persen) | ≤ 80   |
| 3.              | Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Secara Berkelanjutan                    | 3                         | Volume Produksi Perikanan Tangkap (juta ton)                                     | 6,47   |
| 4.              | Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Kelembagaan Ekonomi Nelayan              | 4                         | Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan yang Dikembangkan (lembaga)                   | 10     |
| 5.              | Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Akuntabel Pengelolaan Perikanan Tangkap | 5                         | Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)  | 86,5   |

**Data Anggaran :**

| NO                                                        | PROGRAM/KEGIATAN                                                                     | ANGGARAN (Rp)            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.                                                        | Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan                                           | 6.256.629.603.000        |
|                                                           | a. Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan |                          |
|                                                           | b. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan                                                   |                          |
|                                                           | c. Pengelolaan Usaha Penangkapan Ikan                                                |                          |
|                                                           | d. Pengelolaan Perlindungan Pemberdayaan Nelayan                                     |                          |
|                                                           | e. Pengelolaan Sumber Daya Ikan                                                      |                          |
| 2.                                                        | Program Dukungan Manajemen                                                           | 422.544.563.000          |
| <b>Total Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2026</b> |                                                                                      | <b>6.256.629.603.000</b> |

Jakarta, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA  
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Sakti Wahyu Trenggono**

PIHAK PERTAMA  
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Lotharia Latif**

## 2.4. Rencana Aksi Penetapan Kinerja

Rencana aksi penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen penetapan kinerja. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala (triwulanan) terhadap pencapaian indikator output dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dilakukan upaya-upaya tindak lanjut guna mengeliminir permasalahan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi disusun hanya untuk menjabarkan IKU sebagaimana pada Tabel berikut ini.

**Tabel 1.** Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026

| NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                          | RENCANA AKSI                                                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks)                                               | Penyusunan/reviu dan sosialisasi pedoman fasilitasi perlindungan nelayan                                               |
|    |                                                                                  | Fasilitasi perlindungan nelayan                                                                                        |
|    |                                                                                  | Penyusunan/reviu dan sosialisasi pedoman fasilitasi perlindungan awak kapal perikanan pelintas batas                   |
|    |                                                                                  | Fasilitasi perlindungan awak kapal perikanan pelintas batas                                                            |
|    |                                                                                  | Pelaksanaan fasilitasi SeHAT nelayan                                                                                   |
|    |                                                                                  | Supervisi dan Evaluasi pelaksanaan SeHAT nelayan                                                                       |
|    |                                                                                  | Pelaksanaan pengembangan usaha nelayan dan usaha keluarga nelayan                                                      |
|    |                                                                                  | Fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan melalui lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan)                        |
|    |                                                                                  | Evaluasi penyaluran pendanaan usaha nelayan                                                                            |
|    |                                                                                  | Reviu dan Sosialisasi petunjuk teknis                                                                                  |
|    |                                                                                  | Pelaksanaan Bantuan                                                                                                    |
|    |                                                                                  | Supervisi dan Evaluasi                                                                                                 |
|    |                                                                                  | Identifikasi dan verifikasi lokasi penataan kampung nelayan                                                            |
|    |                                                                                  | Pelaksanaan Penataan kampung nelayan                                                                                   |
|    |                                                                                  | Supervisi dan Evaluasi penataan kampung nelayan                                                                        |
|    |                                                                                  | Pelaksanaan Bantuan Sarana Pengembangan Usaha Nelayan dalam rangka Pembentukan Korporasi Nelayan                       |
|    |                                                                                  | Identifikasi kegiatan penataan kampung nelayan                                                                         |
|    |                                                                                  | Identifikasi Nelayan kecil yang dipantau pemberdayaan usahanya                                                         |
|    |                                                                                  | identifikasi Kelompok nelayan yang dipantau pemberdayaan usahanya                                                      |
|    |                                                                                  | identifikasi identitas nelayan dalam rangka perlindungannya                                                            |
|    |                                                                                  | koordinasi dan pelaporan hasil identifikasi identitas nelayan dalam rangka perlindungannya                             |
|    |                                                                                  | Identifikasi Persiapan Kegiatan Kelompok Nelayan yang diidentifikasi kampung nelayannya untuk difasilitasi penataannya |
|    |                                                                                  | Laporan Data Nelayan yang teridentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan                      |
| 2  | Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang Berada pada Batas Biologis yang Aman (persen) | Penyusunan/pelaksanaan RPP di WPPNRI Perairan Darat                                                                    |
|    |                                                                                  | Identifikasi dan pengolahan data serta analisis kondisi perikanan di perairan darat dengan pendekatan ekosistem        |
|    |                                                                                  | Operasionalisasi Lembaga WPPNRI Perairan Darat                                                                         |

| NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA                      | RENCANA AKSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                              | <p>Pelaksanaan dan Evaluasi Rencana pengelolaan perikanan tuna cakalang tongkol</p> <p>Pengolahan dan Analisis Data Pemanfaatan Tuna</p> <p>Kerjasama dan Partisipasi pada Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional/Internasional</p> <p>Sosialisasi pendaftaran kapal perikanan Indonesia ke RFMO</p> <p>Penghitungan dan Penyusunan Alokasi Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan Pusat dan Daerah dalam rangka mendukung Penangkapan ikan terukur</p> <p>Sosialisasi Alokasi Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan di Pusat dan Daerah</p> <p>Pengolahan, Analisis dan Pemanfaatan Data Log Book Penangkapan Ikan</p> <p>Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Logbook Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan</p> <p>Sosialisasi Penerapan e-Log Book Penangkapan Ikan</p> <p>Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) dan Harvest Strategy untuk mendukung Perikanan Terukur berbasis WPPNRI</p> <p>Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem untuk mendukung Perikanan Terukur berbasis WPPNRI</p> <p>Penyusunan Ketentuan dan Pedoman Teknis Pemantau di atas Kapal Perikanan</p> <p>Pengolahan dan Analisis Data Pemantau di atas kapal perikanan dalam rangka mendukung Penangkapan Ikan terukur</p> <p>Operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI dalam mendukung Penangkapan Ikan Terukur</p> <p>Operasionalisasi LPP WPPNRI dalam mendukung Penangkapan Ikan Terukur</p> <p>Pelaksanaan pembangunan prasarana pemulihan habitat sumber daya ikan dalam mendukung penangkapan ikan terukur</p> <p>Monitoring dan evaluasi pemulihan habitat sumber daya ikan dalam mendukung penangkapan ikan terukur</p> |
| 3  | Volume Produksi Perikanan Tangkap (Juta Ton) | <p>Reviu kebijakan pengelolaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan</p> <p>Pengumpulan, pengolahan, dan analisa data alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan</p> <p>Penyusunan bahan kebijakan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan</p> <p>Pemantauan dan standarisasi permesinan kapal perikanan serta penggunaan bahan bakar untuk mesin kapal perikanan</p> <p>Penyusunan norma/standar/prosedur/kriteria bidang kapal perikanan</p> <p>Implementasi kebijakan bidang kapal perikanan</p> <p>Pendukung layanan publik bidang kapal perikanan</p> <p>Fasilitasi dan pembinaan peningkatan pengetahuan/kompetensi nelayan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA | RENCANA AKSI                                                                                                             |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                         | Identifikasi operasionalisasi bantuan sarana penangkapan ikan                                                            |
|    |                         | Penyusunan/reviu pedoman penerbitan dokumen awak kapal perikanan                                                         |
|    |                         | Pelaksanaan penerbitan dokumen awak kapal perikanan                                                                      |
|    |                         | Pelaksanaan Penerbitan dokumen rekomendasi kelayakan Calon Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)         |
|    |                         | Pelaksanaan sertifikasi awak kapal perikanan                                                                             |
|    |                         | Pelaksanaan sertifikasi petugas di bidang kapal perikanan                                                                |
|    |                         | Penyusunan/reviu pedoman fasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL)                                                |
|    |                         | Pelaksanaan fasilitasi Perjanjian Kerja Laut (PKL)                                                                       |
|    |                         | Pelaksanaan bantuan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan                                                  |
|    |                         | Pelaksanaan bantuan sarana penangkapan ikan                                                                              |
|    |                         | Pelabuhan perikanan yang diidentifikasi rencana pembangunan/pengembangan fasilitasnya                                    |
|    |                         | Pelabuhan perikanan yang dibina tata kelola dan operasionalnya sesuai standar                                            |
|    |                         | Pelabuhan Perikanan yang dibina kegiatan kesyahbandarannya sesuai standar                                                |
|    |                         | Pelaksanaan Pemantauan dan Analisis di Pelabuhan Perikanan                                                               |
|    |                         | Pengelolaan Sistem Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)                                                            |
|    |                         | Fasilitasi Pelatihan Bidang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan                                                        |
|    |                         | Petugas mutu di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihannya                                                       |
|    |                         | Tata kelola dan operasional Pelabuhan Perikanan di lokasi SKPT                                                           |
|    |                         | Pendampingan dan Supervisi Operasional dalam menunjang pelaksanaan PNBK pasca produksi                                   |
|    |                         | Pelaksanaan pengadaan sarana penunjang pemungutan PNBK Perikanan Tangkap yang disediakan                                 |
|    |                         | Pelaksanaan pembangunan/pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan di UPT Pusat untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur |
|    |                         | Pelaksanaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional                                |
|    |                         | Pelaksanaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Terluar dan/atau berwawasan lingkungan                                      |
|    |                         | Pelaksanaan pembangunan/pengembangan prasarana pelabuhan perikanan untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur              |
|    |                         | Stakeholder pelabuhan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang kepelabuhanan perikanan                      |
|    |                         | Penyusunan/Reviu Pedoman Penataan Perizinan untuk mendukung Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur                           |
|    |                         | Dukungan kegiatan penerapan penarikan PNBK pascaproduksi                                                                 |

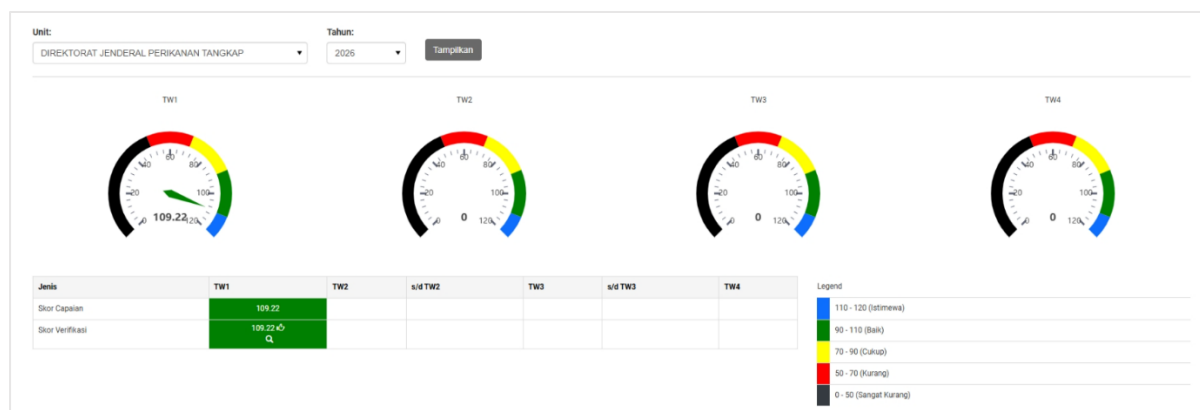
| NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                                              | RENCANA AKSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                      | Pemantauan dan evaluasi perizinan dalam rangka mendukung Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur<br>Penyusunan/Reviu pedoman pemungutan penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam perikanan<br>Dukungan Kegiatan PNB<br>Penataan dan evaluasi alokasi izin usaha penangkapan ikan<br>Penghitungan dan validasi Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP)<br>Identifikasi, analisis dan verifikasi dokumen kapal perikanan<br>Evaluasi pemberian perizinan berusaha penangkapan/pengangkutan ikan<br>Penyusunan/reviu juknis fasilitasi Nelayan kecil yang difasilitasi perizinan berusahanya<br>Pelaksanaan fasilitas Nelayan Kecil yang difasilitasi perizinan berusahanya<br>Supervisi dan Evaluasi Nelayan kecil yang difasilitasi perizinan berusahanya<br>Identifikasi usaha penangkapan ikan<br>pelaporan hasil identifikasi usaha penangkapan ikan<br>Pelaporan sistem usaha perikanan tangkap yang terdigitalisasi dan terintegrasi<br>Penyusunan/Reviu Pedoman Pengelolaan Perizinan Pusat dan Daerah<br>Implementasi Integrasi Sistem Perizinan Pusat dan Daerah<br>Penyiapan bahan standar teknologi penangkapan ikan<br>Penyiapan rekomendasi teknis teknologi penangkapan ikan<br>Pengujian Sarana Penangkapan Ikan<br>Sertifikasi Sarana Penangkapan Ikan<br>Pelaksanaan Tata kelola dan Operasional di pelabuhan perikanan<br>Pelaksanaan Perencanaan, Pengendalian dan Pengelolaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Terluar dan/atau berwawasan lingkungan<br>Pelaksanaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional |
| 4  | Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam yang Terfasilitasi (lembaga) | Pendampingan peningkatan kapasitas kelembagaan KUB dalam rangka pengembangan korporasi nelayan<br>Reviu dan Sosialisasi Petunjuk Teknis Kelembagaan Usaha Nelayan<br>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Nelayan<br>Supervisi dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Nelayan (KUB dan Koperasi)<br>Penyusunan/reviu dan sosialisasi pedoman kelembagaan usaha nelayan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5  | Nilai implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)                      | Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran<br>Koordinasi Hukum<br>Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA | RENCANA AKSI                                                                                    |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                         | Pengadaan sarana perkantoran                                                                    |
|    |                         | Pengadaan dan Rehabilitasi prasarana perkantoran                                                |
|    |                         | Perencanaan Penyelenggaraan Tata Usaha dan Rumah Tangga Kantor Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap |
|    |                         | Koordinasi Perencanaan pengelolaan data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap              |
|    |                         | Penyelenggaraan, pengolahan dan validasi data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap        |
|    |                         | Pemantauan dan evaluasi pengelolaan data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap             |
|    |                         | Optimalisasi Pelaksanaan Program Prioritas dan Efisiensi Biaya Operasional                      |
|    |                         | Pengelolaan hubungan masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap                                |
|    |                         | Kerjasama Internasional dan Antarlembaga lingkup Ditjen Perikanan Tangkap                       |
|    |                         | Pengelolaan BMN di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap                             |
|    |                         | Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan Disiplin Pegawai                                        |
|    |                         | Pengembangan, Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional                                      |
|    |                         | Pengelolaan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap                                            |
|    |                         | Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran                             |
|    |                         | Reviu program dan kebijakan Ditjen Perikanan Tangkap                                            |
|    |                         | Koordinasi lintas instansi dalam rangka pemantuan dan evaluasi                                  |
|    |                         | Pelaporan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap                                             |
|    |                         | Perencanaan kearsipan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap                                          |

## BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembangunan perikanan tangkap pada triwulan I tahun 2026 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap menitikberatkan pada 5 (lima) Sasaran Program dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama untuk menunjang pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan Tangkap. Hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon I.



**Gambar 2.** Dashboard Aplikasi Kinerja DJPT Triwulan I Tahun 2026

Capaian kinerja DJPT pada triwulan I tahun 2026 masuk dalam kategori “Baik”, hal ini ditandai dengan Nilai capaian Kinerja IKU sebesar 109,22. Terdapat 2 (dua) IKU yang dilakukan pengukuran pada triwulan I, yaitu IKU Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Volume Produksi Perikanan Tangkap. Capaian atas kedua IKU tersebut dapat melebihi target (di atas 100%) dengan masing-masing realisasi IKU yakni NTN sebesar 108,46 (102,32% dari target sebesar 106) dan Volume Produksi sebesar 1,73 juta ton (116,11% dari target 1,46 juta ton).

Adapun rekapitulasi capaian indikator kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada triwulan I tahun 2026 seperti pada tabel berikut.

**Tabel 2.** Capaian Indikator Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap Triwulan I Tahun 2026

| SASARAN PROGRAM |                                                                    | INDIKATOR KINERJA UTAMA |                                                                                  | TARGET PK 2026 | TRIWULAN I TAHUN 2026      |           |           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------|-----------|
|                 |                                                                    |                         |                                                                                  |                | TARGET                     | REALISASI | % CAPAIAN |
| 1               | Kesejahteraan Nelayan Meningkat                                    | 1                       | Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks)                                               | 106            | 106                        | 108,46    | 102,32    |
| 2               | Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan            | 2                       | Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang Berada pada Batas Biologis yang Aman (persen) | ≤ 80           | Periode Pengukuran Tahunan |           |           |
| 3               | Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Secara Berkelanjutan       | 3                       | Volume Produksi Perikanan Tangkap (juta ton)                                     | 6,47           | 1,49                       | 1,73      | 116,11    |
| 4               | Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Kelembagaan Ekonomi Nelayan | 4                       | Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan yang Dikembangkan (lembaga)                   | 10             | Periode Pengukuran Tahunan |           |           |

| SASARAN PROGRAM |                                                                                            | INDIKATOR KINERJA UTAMA |                                                                                 | TARGET PK 2026 | TRIWULAN I TAHUN 2026      |           |           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------|-----------|
|                 |                                                                                            |                         |                                                                                 |                | TARGET                     | REALISASI | % CAPAIAN |
| 5               | Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap | 5                       | Nilai implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (nilai) | 86,5           | Periode Pengukuran Tahunan |           |           |

### 3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran Program dan indikator kinerja untuk setiap perspektif sebagai berikut :

#### 3.2.1. Sasaran Program (SP-1) : Kesejahteraan Nelayan Meningkat

Sasaran Program-1 “Kesejahteraan nelayan meningkat”, memiliki IKU (Indikator Kinerja Utama) yakni Nilai Tukar Nelayan (NTN). Kesejahteraan masyarakat nelayan diartikan bahwa pengelolaan sumber daya ikan dilakukan untuk kepentingan kemakmuran rakyat, dalam hal ini DJPT senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh nelayan melalui program dan kegiatan pembangunan perikanan tangkap yang dilaksanakan. Sasaran strategis ini bertujuan untuk optimasi pengelolaan sumber daya perikanan tangkap.

#### Nilai Tukar Nelayan (NTN)

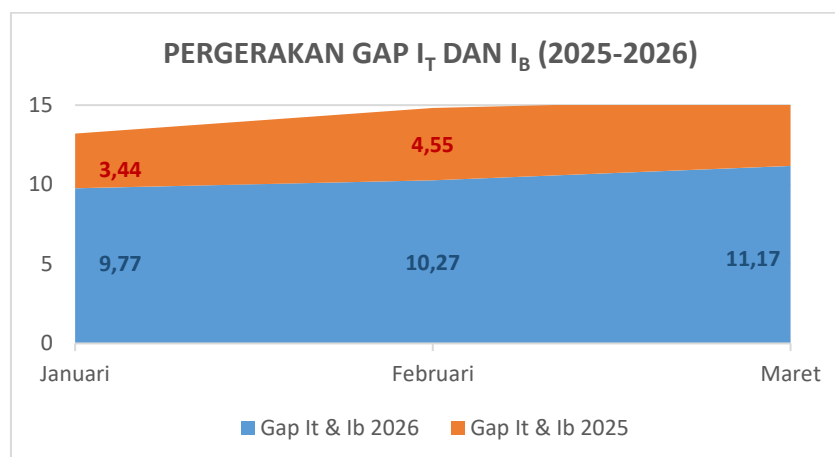
NTN adalah indikator yang mengukur kemampuan daya beli nelayan sebagai salah satu pelaku utama di subsektor perikanan tangkap. NTN diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh nelayan dengan harga yang dibayarkan nelayan yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik.

**Tabel 3.** Capaian IKU “Nilai Tukar Nelayan (NTN)” Triwulan I Tahun 2026

| SP 1 Kesejahteraan Nelayan Meningkat |           |           |           |           |                   |                  |                     |                                  |                             |                     |                                         |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| IKU 1 Nilai Tukar Nelayan (NTN)      |           |           |           |           |                   |                  |                     |                                  |                             |                     |                                         |
| Realisasi TW I 2021-2025             |           |           |           |           | Realisasi 2026    |                  |                     |                                  |                             | Renstra DJPT        |                                         |
| TW I 2021                            | TW I 2022 | TW I 2023 | TW I 2024 | TW I 2025 | Target Tahun 2026 | Target TW I 2026 | Realisasi TW I 2026 | % Realisasi thd Target TW I 2026 | % Realisasi thd Target 2026 | Target Renstra 2029 | % Capaian TW I thd Target Akhir Renstra |
| 102,92                               | 107,08    | 105,73    | 101,81    | 103,39    | 106               | 106              | 108,46              | 102,32                           | 102,32                      | 109                 | 99,50                                   |

Selama triwulan I tahun 2026, NTN telah mencapai dan melampaui target tahunan sebesar 106. Nilai tertinggi NTN tercatat pada bulan Maret sebesar 109,05 dan terendah pada bulan Januari sebesar 107,96. Jika dibandingkan dengan capaian NTN triwulan I tahun 2025 (103,39), realisasi capaian NTN triwulan I tahun 2026 mengalami peningkatan sebesar 4,90%. Walaupun biaya konsumsi rumah tangga dan produksi nelayan mengalami kenaikan yang berpotensi menggerus keuntungan atau daya beli nelayan, peningkatan capaian NTN pada triwulan I tahun 2026 menunjukkan adanya perbaikan daya beli nelayan yang didorong oleh capaian positif pada sisi pendapatan. Jika dibandingkan dengan target NTN sampai akhir Renstra tahun 2026 sebesar 106 posisi capaian triwulan I tahun 2026 sudah mencapai 102,32%. Berdasarkan wilayah administratif, NTN tertinggi dicapai oleh Provinsi Aceh dengan

capaian sebesar 129,98 dan NTN terendah berada di Provinsi Papua dengan capaian sebesar 93,64.



**Gambar 3.** Grafik Pergerakan Gap  $I_t$  dan  $I_b$  Triwulan I Tahun 2025 dan 2026

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa *gap* antara Indeks Harga yang Diterima Nelayan ( $I_t$ ) dan Indeks Harga yang Dibayar Nelayan ( $I_b$ ) triwulan I tahun 2026 lebih besar dibandingkan dengan gap antara  $I_t$  dan  $I_b$  pada tahun 2025. Kemudian jika dilihat dari pergerakan,  $I_t$  dan  $I_b$  pada tahun 2026 semakin membesar di bandingkan dengan tahun 2025. Hal ini yang mengakibatkan nilai NTN triwulan I tahun 2026 lebih tinggi dibandingkan triwulan I tahun 2025.

Dari komponen pembentuknya, peningkatan NTN terutama dipengaruhi oleh kenaikan Indeks Harga yang Diterima ( $I_t$ ) yang menunjukkan tren meningkat dari 132,37 pada Januari menjadi 134,57 pada Maret. Kenaikan ini didorong oleh subsektor penangkapan laut yang relatif stabil dan tinggi, yaitu dari 132,56 menjadi 134,79, serta perairan umum yang juga mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa harga hasil tangkapan nelayan berada pada kondisi yang cukup baik dan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan nelayan.

Berdasarkan Indeks Harga yang Dibayar ( $I_b$ ), terlihat kenaikan namun dengan laju yang lebih rendah dibandingkan  $I_t$ , yaitu dari 122,6 pada Januari menjadi 123,4 pada Maret, terutama dari komponen konsumsi rumah tangga (127,46 menjadi 128,77). Selain itu Pada komponen biaya produksi, BPPBM mengalami kenaikan dari 117,19 pada Januari menjadi 117,5 pada Maret, namun masih relatif terkendali dan tidak meningkat secara signifikan dibanding kenaikan  $I_t$ .

Dalam mencapai NTN, Ditjen Perikanan Tangkap telah melakukan beberapa kegiatan yang mendukung, seperti:

- Penyelesaian pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Tahap I Tahun 2025 di 65 lokasi, yang meliputi pembangunan penyediaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana pokok/utama dan penunjang di kawasan perikanan yang mendukung peningkatan produktivitas usaha sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan nelayan;
- Pemantauan dan pendampingan di pelabuhan perikanan melalui pelaksanaan gerai perizinan berusaha di berbagai daerah;
- Pelaksanaan Training of Trainers (ToT) Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan dengan tujuan pendataan akurat dan terintegrasi di pelabuhan perikanan dalam mendukung

implementasi Penangkapan Ikan Terukur, optimalisasi PNBP, serta pengambilan kebijakan berbasis data;

Upaya untuk meningkatkan penerimaan nelayan dapat dilakukan melalui peningkatan produktivitas dan kualitas hasil tangkapan, penguatan kapasitas SDM nelayan, perluasan akses pembiayaan, serta penguatan kemitraan pemasaran melalui koperasi dan *offtaker*. Sementara itu, efisiensi biaya usaha didorong melalui penyaluran bantuan sarana penangkapan, penguatan akses BBM bersubsidi, percepatan pembangunan SPBUN, serta penerapan teknologi penangkapan yang lebih hemat energi dan efisien..

### **3.2.2. Sasaran Program (SP-2) : Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan**

Sasaran Strategis-2 “Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan”, memiliki IKU (Indikator Kinerja Utama) yakni Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang Berada pada Batas Biologis yang Aman. Pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap dilakukan dengan memperhatikan laju penangkapan setiap stok ikan tidak melebihi nilai *Maximum Sustainable Yield* (MSY) di setiap unit wilayah pengelolaan perikanan. Sehingga tetap meningkatkan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Sasaran strategis ini bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan guna menjaga ketahanan pangan.

#### **Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman**

Pengelolaan perikanan mencakup seluruh upaya yang terintegrasi, termasuk proses pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pengambilan keputusan, alokasi sumber daya ikan, implementasi, serta penegakan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Upaya ini dilakukan oleh pemerintah atau otoritas terkait untuk memastikan keberlanjutan produktivitas sumber daya perairan dan pencapaian tujuan yang telah disepakati. Sumber daya ikan mencakup potensi semua jenis ikan yang tersedia. Pemilihan tindakan pengelolaan sebaiknya mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi lainnya. Selain itu, pengambilan keputusan pengelolaan harus dilakukan dengan hati-hati, berdasarkan karakteristik Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) serta menggunakan data statistik yang valid sebagai dasar penilaian.

Indikator ini mengukur sejauh mana kebijakan perikanan tangkap dalam melakukan pengelolaan perikanan di WPPNRI atau jenis ikan tertentu melalui kegiatan kapal perikanan yang menerapkan log book penangkapan ikan, kapal perikanan yang dipantau oleh observer, dan penghitungan kuota sumber daya ikan. Banyaknya kapal perikanan yang melaporkan logbook penangkapan ikan untuk setiap tripnya memberikan gambaran sederhana tingkat eksploitasi atas potensi perikanan dan ketersediaan data penangkapan ikan di WPPNRI. Sementara pemantauan observer selama hari laut kapal perikanan, menjamin ketersediaan data yang dapat digunakan sebagai data pembanding sekaligus sarana validasi data log book penangkapan ikan dan memberikan informasi terkait data biologis ikan hasil tangkapan serta aktivitas penangkapan di atas kapal, misalnya penangkapan ikan dilindungi yang tertangkap oleh alat penangkap ikan yang digunakan. Perhitungan IKU “Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang Berada pada Batas Biologis yang Aman” dihitung dari jumlah volume produksi perairan laut pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah potensi sumber daya ikan sesuai dengan

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di WPPPNRI.

Realisasi proporsi untuk triwulan I tahun 2026 belum ada karena pengukuran IKU ini dilakukan secara tahunan. Dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan yang semakin maju dan berkelanjutan, diperlukan berbagai hal seperti data statistik yang semakin akurat, operasi penangkapan ikan yang makin efisien, sarana dan prasarana perikanan tangkap yang optimal, serta harga ikan yang stabil. Upaya yang telah dilakukan untuk menjaga proporsi tangkapan dilakukan melalui kegiatan:

- Pertemuan Identifikasi Pengumpulan Data Pemanfaatan Sumber Daya Ikan dengan dukungan Marine Stewardship Council(MSC) dan Yayasan IPNLF Indonesia (YII);
- Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Gurita yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, NGO, hingga perwakilan nelayan;
- Partisipasi dalam The 30th Session of the Coastal States Alliance (CSA-30) dalam pengelolaan sumber daya ikan yang bermigrasi lintas wilayah dan lintas negara, khususnya tuna di Samudera Hindia; dan
- Transformasi tata kelola Observer on-board melalui inovasi digital aplikasi Obor dan e-Logbook versi 3 untuk mendukung perikanan tangkap yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

### 3.2.3.Sasaran Program (SP-3) : Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Secara Berkelanjutan

Sasaran Program-3 “Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Secara Berkelanjutan”, memiliki IKU (Indikator Kinerja Utama) yakni volume produksi perikanan tangkap. Sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini, Ditjen Perikanan Tangkap telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mewujudkan tercapainya sasaran strategis terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya ikan yaitu melalui peningkatan kepatuhan pelaku usaha serta membangun sentra bisnis kelautan dan perikanan. Sasaran strategis ini bertujuan untuk meningkatkan industrialisasi perikanan tangkap yang berdaya saing.

#### Volume produksi perikanan tangkap

Produksi perikanan tangkap terdiri dari volume produksi yang di daratkan di laut maupun perairan darat. Produksi perikanan tangkap berasal dari pelabuhan perikanan dan hasil agregasi kabupaten/kota dengan menggunakan metode sampling. Realisasi produksi perikanan tangkap diukur dan dilaporkan secara berkala setiap triwulan oleh Pusdatin KKP.

**Tabel 4.** Capaian IKU “Volume Produksi Perikanan Tangkap” triwulan I tahun 2026

| SP 3 : Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Secara Berkelanjutan |           |           |           |           |                   |                  |                     |                                  |                             |                     |                                         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| IKU 3 : Volume Produksi Perikanan Tangkap                           |           |           |           |           |                   |                  |                     |                                  |                             |                     |                                         |
| Realisasi TW I 2021-2025                                            |           |           |           |           | Realisasi 2026    |                  |                     |                                  |                             | Renstra DJPT        |                                         |
| TW I 2021                                                           | TW I 2022 | TW I 2023 | TW I 2024 | TW I 2025 | Target Tahun 2026 | Target TW I 2026 | Realisasi TW I 2026 | % Realisasi thd Target TW I 2026 | % Realisasi thd Target 2026 | Target Renstra 2029 | % Capaian TW I thd Target Akhir Renstra |
| 1,98                                                                | 1,90      | 1,88      | 1,68      | 1,7       | 6,47              | 1,49             | 1,73                | 116,11                           | 26,74                       | 7,50                | 23,07                                   |

Volume produksi perikanan tangkap triwulan I tahun 2026 sebesar 1,73 juta ton atau mencapai 116,11% dari target triwulan I tahun 2026 yaitu sebesar 1,49 juta ton. Volume produksi perikanan tangkap tersebut berasal dari 93,3% produksi perikanan tangkap di laut yaitu sebesar 1,62 juta ton dan sisanya sebesar 6,7% atau 0,12 juta ton berasal dari perairan darat. Hal ini menunjukkan bahwa produksi triwulan I tahun 2026 telah mencapai target. Laporan produksi yang didaratkan di pelabuhan perikanan UPT pusat dan beberapa UPT daerah pada triwulan I tahun 2026 menunjukkan peningkatan produksi sebesar 2% dibandingkan dengan produksi pada triwulan I tahun 2025 (*year on year*). Peningkatan produksi yang cukup signifikan di beberapa pelabuhan UPT Pusat antara lain PPS Bungus, PPS Kendari, PPN Ambon, dan PPP Teluk Batang.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai target volume produksi perikanan tangkap diantaranya:

- a. Kegiatan pendataan yang berbasis daerah penangkapan dengan penempatan enumerator pendataan ikan hasil tangkapan sebanyak 441 orang di 22 UPT Pelabuhan Perikanan dan 177 Pelabuhan Pangkalan;
- b. Pelaksanaan Training of Trainers (ToT) Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan dengan tujuan pendataan akurat dan terintegrasi di pelabuhan perikanan dalam mendukung implementasi Penangkapan Ikan Terukur, optimalisasi PNBK, serta pengambilan kebijakan berbasis data;
- c. Pendataan kapal dan pemetaan alur pelayaran di pelabuhan perikanan untuk mendukung produktivitas perikanan tangkap; dan
- d. Pemantauan dan pendampingan intensif di pelabuhan perikanan yang meliputi aktivitas pendaratan ikan, layanan TPI, hingga kesiapan petugas di lapangan.

Beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai upaya untuk mendorong peningkatan produksi perikanan tangkap, yaitu: 1) percepatan penyaluran bantuan pemerintah untuk nelayan (alat tangkap dan mesin kapal); 2) Koordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina untuk mendapatkan kuota BBM bersubsidi bagi nelayan; 3) koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan Kementerian BUMN untuk memperluas jangkauan program solar untuk koperasi nelayan; dan 4) mempermudah akses pendanaan dan permodalan bagi nelayan untuk operasional melaut melalui KUR, gerai pendanaan, dan gerai nelayan.

### **3.2.4. Sasaran Program (SP-4) : Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Kelembagaan Ekonomi Nelayan**

Sasaran Program-4 “Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Kelembagaan Ekonomi Nelayan”, memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan yang Dikembangkan. Indikator ini menunjukkan kelembagaan ekonomi nelayan yang mendapatkan fasilitasi pengembangan dan pembinaan kapasitas kelembagaan dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi nelayan. Penguatan basis ekonomi nelayan melalui peningkatan kapasitas organisasi, manajerial, dan kewirausahaan kelembagaan nelayan.

## **Jumlah kelembagaan ekonomi nelayan yang dikembangkan**

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerima mandat: a) mendorong kelompok pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUB, Poklahsar, Pokdakan dan Kelompok Petambak Garam) bergabung di dalam Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan b) mendorong Koperasi yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan bertransformasi menjadi KDKMP. Selanjutnya, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Mineral, KKP melalui Ditjen Perikanan tangkap telah mencanangkan program Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang akan dilaksanakan di  $\pm 1.000$  Desa. Program KNMP ini bersinergi dengan KDKMP yang ditetapkan sebagai Kelompok Masyarakat Pengelola bantuan sarana dan prasarana di kawasan KNMP.

Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup nelayan dan keluarganya, diperlukan penataan menyeluruh kampung nelayan terutama melalui penyediaan dan perbaikan sarana serta prasarana publik, penguatan kelembagaan ekonomi lokal, dan integrasi pelayanan dasar. Dari kebutuhan tersebut, pemerintah melaksanakan program prioritas Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam memperkuat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat nelayan secara berkelanjutan.

Program Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik kawasan, tetapi juga mencakup transformasi sosial dan ekonomi masyarakatnya. Dengan menjadikan koperasi sebagai penggerak utama, program ini mendukung terciptanya ekosistem usaha nelayan yang terorganisir, inklusif, dan terhubung dengan pasar. Dalam konteks ini, kampung nelayan bukan lagi dipandang sekadar sebagai wilayah hunian informal, melainkan sebagai kawasan yang produktif, layak huni, dan berdaya saing tinggi.

Realisasi kinerja untuk triwulan I tahun 2026 belum ada karena pengukuran dilakukan secara tahunan. Adapun kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung IKU ini antara lain:

- a. Sinergi dengan pemerintah daerah melalui sosialisasi, koordinasi, kunjungan lapang, dan audiensi dalam rangka pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP);
- b. Pelaksanaan Training of Trainers untuk surveyor meliputi asesmen lahan, sosial-ekonomi, serta potensi bisnis dan usaha perikanan calon lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2026; dan
- c. Pelaksanaan survei identifikasi calon lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di wilayah Papua.

### **3.2.5. Sasaran Program (SP-5): Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap**

Sasaran Program-5 “Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap”, memiliki Indikator Kinerja Manajerial yakni Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Sasaran program ini bertujuan untuk mengukur implementasi Reformasi Birokrasi *General* lingkup DJPT yang berasal dari hasil evaluasi seluruh indikator pembentuk.

## Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

Memasuki periode awal dalam rancangan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2025-2045 dengan visi Terwujudnya birokrasi kompetitif berkelas untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045, pelaksanaan *roadmap* reformasi birokrasi pada periode 2025-2029 diharapkan mampu melakukan percepatan dengan fokus/tema *Digital Governance* menuju *Human-based Governance*. Percepatan yang dilakukan mempunyai sasaran transformasi digital, sistem merit ASN, birokrasi beretika dan inovatif, kelembagaan berkinerja tinggi, serta pelayanan publik berkualitas dan inklusif. Dalam mengukur kemajuan capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) diperlukan serangkaian aktivitas pengambilan informasi, analisis, dan pemberian nilai yang disebut evaluasi reformasi birokrasi.

Evaluasi terhadap RB *General* adalah upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian permasalahan hulu terkait masalah umum birokrasi melalui berbagai kebijakan kementerian/lembaga di tingkat meso. Nilai indikator kinerja ini diperoleh dari hasil evaluasi seluruh indikator pembentuk yang terdiri dari akuntabilitas kinerja dan keuangan, pembangunan integritas, profesionalitas ASN, pelayanan publik, reformasi hukum, tata laksana, kearsipan dan pengadaan barang/jasa. Indikator komposit pembentuk nilai implementasi RB disusun dalam tabel berikut:

**Tabel 5.** Indikator Komposit Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi DJPT

| Indikator Kinerja                                                                                              | Satuan | Bobot |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen Perikanan Tangkap     | Persen | 10    |
| Batas tertinggi nilai temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen Perikanan Tangkap                         | Persen | 10    |
| Nilai PM SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap                                                                        | Nilai  | 10    |
| IKPA Ditjen Perikanan Tangkap                                                                                  | Nilai  | 10    |
| Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap                                                    | Nilai  | 10    |
| Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP Ditjen Perikanan Tangkap                                              | Nilai  | 10    |
| Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap                                                            | Indeks | 10    |
| Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Tangkap                                                   | Nilai  | 10    |
| Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap                       | Persen | 10    |
| Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Tangkap                                                          | Nilai  | 10    |
| Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan menteri dan keputusan menteri di bidang Perikanan Tangkap | Persen | 5     |
| Persentase penyelesaian proses bisnis level 2 dan 3 dan SOP Ditjen Perikanan Tangkap                           | Persen | 5     |

Belum terdapat capaian indikator kinerja Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Perikanan Tangkap karena periode pengukuran dilakukan secara tahunan. Namun dalam upaya memenuhi target indikator kinerja ini, DJPT telah melaksanakan kegiatan:

1. koordinasi dengan Inspektorat Jenderal khususnya Inspektorat II dan unit kerja lingkup DJPT dalam rangka pemantauan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan sampai tuntas;
2. pengusulan calon unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ke Inspektorat Jenderal KKP;

3. penyusunan dokumen perencanaan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap serta koordinasi penyelesaian tindak lanjut evaluasi SAKIP KKP tahun 2025 bersama Biro Perencanaan;
4. penyelenggaraan konsultasi publik terhadap rancangan Keputusan Menteri KP tentang Rencana Pengelola Perikanan Gurita serta rapat koordinasi penyusunan rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Pengelolaan Perikanan WPPNRI 712 dan 572;
5. penyusunan rancangan Keputusan Dirjen PT tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2026; dan
6. penyusunan dokumen manajemen risiko konflik kepentingan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap serta rancangan Keputusan Dirjen PT terkait Tim Pengelolaan Konflik Kepentingan, dan Tim Unit Pengendali Gratifikasi (Pusat dan UPT).

### 3.3. Kinerja Anggaran

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada tahun 2026 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp6.481.780.607.000,- atau naik 145% dari pagu alokasi anggaran tahun 2025. Adapun kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya program prioritas Presiden RI yaitu Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Tahun 2026. Namun dengan masih berlakunya kebijakan efisiensi anggaran yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka alokasi anggaran Ditjen Perikanan Tangkap setelah blokir menjadi Rp6.417.196.266.000,-. Alokasi anggaran tersebut sebesar 4,16% digunakan untuk belanja pegawai; 87,22% untuk belanja barang; dan 8,62% untuk belanja program modal. Realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2026 sebesar Rp107.792.769.853 atau mencapai 1,68%.

**Tabel 6.** Alokasi dan Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2026 Berdasarkan Jenis Kegiatan

| No.          | Kegiatan                                                                          | Anggaran (Rp)            | Anggaran Efektif (Rp)    | Realisasi Anggaran (Rp) | %           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| 1            | Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan | 518.807.249.000          | 518.721.518.000          | 1.771.158.194           | 0,34        |
| 2            | Pengelolaan Pelabuhan Perikanan                                                   | 657.057.340.000          | 600.664.757.000          | 8.750.291.165           | 1,46        |
| 3            | Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan                                             | 2.811.880.000            | 2.811.880.000            | 523.353.861             | 18,61       |
| 4            | Pengelolaan Sumber Daya Ikan                                                      | 2.393.057.000            | 1.729.666.000            | 55.170.947              | 3,19        |
| 5            | Pengelolaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan                                 | 4.902.974.641.000        | 4.902.528.622.000        | 8.572.882.912           | 0,17        |
| 6            | Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen Perikanan Tangkap                      | 397.736.440.000          | 390.739.823.000          | 88.119.912.774          | 22,55       |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                   | <b>6.481.780.607.000</b> | <b>6.417.196.266.000</b> | <b>107.792.769.853</b>  | <b>1,68</b> |

Tabel di atas memperlihatkan anggaran Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan kegiatan. pada periode triwulan I tahun 2026 realisasi tertinggi terdapat pada kegiatan Dukungan Manajemen dan realisasi terendah terdapat pada kegiatan Pengelolaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Hal ini disebabkan oleh adanya program prioritas Kampung Nelayan Merah Putih yang akan dibangun pada tahun 2026 masih dalam tahap persiapan sehingga anggaran belum dapat direalisasikan.

**Tabel 7. Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja**

| No.          | Jenis Belanja   | Anggaran (Rp)            | Anggaran Efektif (Rp)    | Realisasi Anggaran (Rp) | %           |
|--------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| 1            | Belanja Pegawai | 269.322.718.000          | 269.322.718.000          | 67.624.559.496          | 25,11       |
| 2            | Belanja Barang  | 5.653.432.025.000        | 5.616.585.266.000        | 39.648.716.202          | 0,71        |
| 3            | Belanja Modal   | 559.025.864.000          | 531.288.282.000          | 519.494.155             | 0,10        |
| <b>TOTAL</b> |                 | <b>6.481.780.607.000</b> | <b>6.417.196.266.000</b> | <b>107.792.769.853</b>  | <b>1,68</b> |

Tabel di atas memperlihatkan bahwa besar anggaran Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan jenis belanja. Adapun realisasi triwulan I tahun 2026 hampir sama dengan realisasi triwulan I tahun 2025 yakni belanja pegawai lebih besar dibandingkan belanja barang maupun modal. Belanja pegawai merupakan pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat yang dibayarkan secara rutin.

**Tabel 8. Alokasi Anggaran Berdasarkan Kewenangan**

| No.          | Jenis Belanja | Anggaran (Rp)            | Anggaran Efektif (Rp)    | Realisasi Anggaran (Rp) | %           |
|--------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| 1            | Pusat         | 5.591.738.148.000        | 5.565.963.778.000        | 37.743.312.831          | 0,68        |
| 2            | UPT           | 890.042.459.000          | 851.232.488.000          | 70.049.457.022          | 8,23        |
| <b>TOTAL</b> |               | <b>6.481.780.607.000</b> | <b>6.417.196.266.000</b> | <b>107.792.769.853</b>  | <b>1,68</b> |

Tabel di atas memperlihatkan bahwa berdasarkan kewenangannya, pada periode triwulan I tahun 2026 realisasi tertinggi adalah pada kewenangan UPT. sedangkan yang realisasi terendah adalah Pusat. Hal ini disebabkan pada triwulan I, realisasi masih terbilang cukup rendah dikarenakan mayoritas program dan kegiatan masih dalam tahap persiapan pelaksanaan.

**Tabel 8. Alokasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana**

| No.          | Jenis Belanja                        | Anggaran (Rp)            | Anggaran Efektif (Rp)    | Realisasi Anggaran (Rp) | %           |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| 1            | Rupiah Murni (RM)                    | 5.815.205.199.000        | 5.815.205.199.000        | 102.340.264.251         | 1,76        |
| 2            | Pinjaman Luar Negeri (PLN)           | 602.428.016.000          | 563.053.368.000          | 2.809.305.729           | 0,50        |
| 3            | Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | 48.147.392.000           | 29.492.632.000           | 2.618.341.099           | 8,88        |
| 4            | Hibah Luar Negeri (HLN)              | 16.000.000.000           | 9.445.067.000            | 24.858.774              | 0,26        |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>6.481.780.607.000</b> | <b>6.417.196.266.000</b> | <b>107.792.769.853</b>  | <b>1,68</b> |

Tabel di atas memperlihatkan bahwa berdasarkan sumber dananya, pada periode triwulan I tahun 2026 realisasi tertinggi yaitu sumber dana PNBPN. sedangkan yang realisasi terendah adalah sumber dana PHLN. Hal ini disebabkan pada triwulan I masih tahap persiapan pelaksanaan kontrak konsultan dan konstruksi pada kegiatan pengembangan Pelabuhan Perikanan sumber dana PHLN.

## BAB 4. PENUTUP

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap merupakan salah satu unit eselon I di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang perikanan tangkap. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ditjen Perikanan Tangkap berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah diterapkan dalam Renstra KKP, Renstra DJPT, dan perjanjian kinerja antara Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

Laporan Kinerja (LKj) DJPT triwulan I tahun 2026 menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) selama triwulan I tahun 2026. Terhadap capaian tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian tahun sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan. Pada tahun triwulan I tahun 2026, rata-rata pencapaian sasaran strategis DJPT adalah sebesar 109,22% (kategori Baik). Berdasarkan pada dokumen Perjanjian Kinerja, Ditjen Perikanan Tangkap pada triwulan I tahun 2026 mempunyai 2 (dua) target dari total 5 (lima) Indikator Kinerja (IK). Capaian atas kedua IK tersebut dapat melebihi target (di atas 100%) dengan masing-masing realisasi IKU yakni NTN sebesar 108,46 (102,32% dari target sebesar 106) dan Volume Produksi sebesar 1,73 juta ton (116,11% dari target 1,46 juta ton). Realisasi capaian NTN triwulan I tahun 2026 mengalami peningkatan sebesar 4,90%. Peningkatan capaian NTN menunjukkan adanya perbaikan daya beli nelayan yang didorong oleh capaian positif pada sisi pendapatan. Volume produksi perikanan tangkap triwulan I tahun 2026 sebesar 1,73 juta ton atau 116,11% dari target sebesar 1,49 juta ton. Peningkatan produksi perikanan tangkap tercatat sebesar 2% dibandingkan triwulan I tahun 2025 (*year on year*).

Realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2026 sebesar Rp107.792.769.853 atau mencapai 1,68% dari total pagu Rp6,417 triliun. Dalam rangka peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, diperlukan beberapa rencana aksi:

- Melakukan verifikasi capaian kinerja secara berkala untuk seluruh satker lingkup Ditjen Perikanan Tangkap baik di Pusat maupun UPT; dan
- Memaksimalkan penyerapan anggaran melalui pelaksanaan kegiatan strategis agar penyerapan anggaran triwulan II lebih meningkat.

# LAMPIRAN

## Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN PERIKANAN

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Lotharia Latif**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA  
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Sakti Wahyu Trenggono**

PIHAK PERTAMA  
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Lotharia Latif**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

| SASARAN PROGRAM |                                                                                 | INDIKATOR KINERJA PROGRAM |                                                                                  | TARGET    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.              | Kesejahteraan Nelayan Meningkat                                                 | 1                         | Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks)                                               | 106       |
| 2.              | Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan                         | 2                         | Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang Berada pada Batas Biologis yang Aman (persen) | $\leq 80$ |
| 3.              | Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Secara Berkelanjutan                    | 3                         | Volume Produksi Perikanan Tangkap (juta ton)                                     | 6,47      |
| 4.              | Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Kelembagaan Ekonomi Nelayan              | 4                         | Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan yang Dikembangkan (lembaga)                   | 10        |
| 5.              | Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Akuntabel Pengelolaan Perikanan Tangkap | 5                         | Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)  | 86,5      |

**Data Anggaran :**

| NO                                                        | PROGRAM/KEGIATAN                                                                     | ANGGARAN (Rp)            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.                                                        | Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan                                           | 6.256.629.603.000        |
|                                                           | a. Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan |                          |
|                                                           | b. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan                                                   |                          |
|                                                           | c. Pengelolaan Usaha Penangkapan Ikan                                                |                          |
|                                                           | d. Pengelolaan Perlindungan Pemberdayaan Nelayan                                     |                          |
|                                                           | e. Pengelolaan Sumber Daya Ikan                                                      |                          |
| 2.                                                        | Program Dukungan Manajemen                                                           | 422.544.563.000          |
| <b>Total Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2026</b> |                                                                                      | <b>6.256.629.603.000</b> |

Jakarta, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA  
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Sakti Wahyu Trenggono**

PIHAK PERTAMA  
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Lotharia Latif**

## Data Nilai Tukar Nelayan Triwulan I Tahun 2026

**Indeks Harga yang Diterima Petani (IT), Indeks Harga yang Dibayar Petani (IB), dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) serta Perubahannya (2018=100), 2026**

Terakhir Diperbarui : 1 April 2026

[← Kembali](#)
[Unduh](#)
[JSON](#)
[Bagikan](#)

2026 [Cari data statistik](#)

☐ Freeze judul kolom

| Sektor NTN<br>(2018=100)                                               | Indeks Harga yang Diterima Petani (IT), Indeks Harga yang Dibayar P |          |        |       |     |      |      |         |           |         |          |          |       |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-----|------|------|---------|-----------|---------|----------|----------|-------|
|                                                                        | Indeks                                                              |          |        |       |     |      |      |         |           |         |          |          |       |
|                                                                        | 2026                                                                |          |        |       |     |      |      |         |           |         |          |          |       |
|                                                                        | Januari                                                             | Februari | Maret  | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Tahun |
| <b>1. INDEKS HARGA YANG DITERIMA PETANI</b>                            | 132,37                                                              | 133,30   | 134,57 | -     | -   | -    | -    | -       | -         | -       | -        | -        | -     |
| 1.1. Penangkapan Perairan Umum                                         | 123,85                                                              | 123,73   | 124,50 | -     | -   | -    | -    | -       | -         | -       | -        | -        | -     |
| 1.2. Penangkapan Laut                                                  | 132,56                                                              | 133,54   | 134,79 | -     | -   | -    | -    | -       | -         | -       | -        | -        | -     |
| <b>2. INDEKS HARGA YANG DIBAYAR PETANI</b>                             | 122,60                                                              | 123,03   | 123,40 | -     | -   | -    | -    | -       | -         | -       | -        | -        | -     |
| <b>2.1. Konsumsi Rumah Tangga</b>                                      | 127,46                                                              | 128,25   | 128,77 | -     | -   | -    | -    | -       | -         | -       | -        | -        | -     |
| 2.1.1. Makanan, Minuman Dan Tembakau                                   | 132,88                                                              | 134,05   | 134,65 | -     | -   | -    | -    | -       | -         | -       | -        | -        | -     |
| 2.1.2. Pakaian Dan Alas Kaki                                           | 123,37                                                              | 123,60   | 124,71 | -     | -   | -    | -    | -       | -         | -       | -        | -        | -     |
| 2.1.3. Perumahan, Air, Listrik Dan Bahan Bakar Rumah Tangga            | 110,99                                                              | 111,10   | 111,36 | -     | -   | -    | -    | -       | -         | -       | -        | -        | -     |
| 2.1.4. Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga     | 120,18                                                              | 120,30   | 120,45 | -     | -   | -    | -    | -       | -         | -       | -        | -        | -     |
| 2.1.5. Kesehatan                                                       | 119,08                                                              | 119,27   | 119,36 | -     | -   | -    | -    | -       | -         | -       | -        | -        | -     |
| 2.1.6. Transportasi                                                    | 121,55                                                              | 121,24   | 121,79 | -     | -   | -    | -    | -       | -         | -       | -        | -        | -     |
| 2.1.7. Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan                        | 102,94                                                              | 102,97   | 102,99 | -     | -   | -    | -    | -       | -         | -       | -        | -        | -     |
| 2.1.8. Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya                                  | 117,65                                                              | 117,76   | 117,85 | -     | -   | -    | -    | -       | -         | -       | -        | -        | -     |
| 2.1.9. Pendidikan                                                      | 104,98                                                              | 104,99   | 104,99 | -     | -   | -    | -    | -       | -         | -       | -        | -        | -     |
| 2.1.10. Penyediaan Makanan Dan Minuman/Restoran                        | 116,77                                                              | 116,90   | 117,02 | -     | -   | -    | -    | -       | -         | -       | -        | -        | -     |
| 2.1.11. Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya                             | 130,56                                                              | 131,92   | 132,37 | -     | -   | -    | -    | -       | -         | -       | -        | -        | -     |
| <b>2.2. Indeks BPPBM (Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal )</b> | 117,19                                                              | 117,28   | 117,50 | -     | -   | -    | -    | -       | -         | -       | -        | -        | -     |
| 2.2.1. Sewa Dan Pengeluaran Lainnya                                    | 114,71                                                              | 114,90   | 115,00 | -     | -   | -    | -    | -       | -         | -       | -        | -        | -     |
| 2.2.2. Transportasi Dan Komunikasi                                     | 121,79                                                              | 121,66   | 122,11 | -     | -   | -    | -    | -       | -         | -       | -        | -        | -     |
| 2.2.3. Barang Modal                                                    | 112,45                                                              | 112,61   | 112,62 | -     | -   | -    | -    | -       | -         | -       | -        | -        | -     |
| 2.2.4. Upah Buruh                                                      | 114,44                                                              | 114,83   | 115,11 | -     | -   | -    | -    | -       | -         | -       | -        | -        | -     |
| <b>3. NILAI TUKAR NELAYAN</b>                                          | 107,96                                                              | 108,34   | 109,05 | -     | -   | -    | -    | -       | -         | -       | -        | -        | -     |
| <b>4. NILAI TUKAR USAHA PERTANIAN</b>                                  | 112,95                                                              | 113,66   | 114,53 | -     | -   | -    | -    | -       | -         | -       | -        | -        | -     |

Keterangan Data :

Mulai Januari 2020 menggunakan Tahun Dasar 2018=100

Sumber data: [Badan Pusat Statistik per 1 April 2026](#)

## Data Volume Produksi Perikanan Tangkap Triwulan I Tahun 2026

### Produksi Perikanan Tangkap Menurut Komoditas Utama Triwulan I Tahun 2026

Satuan : Ton

| Perikanan Tangkap    | TW I - 2025*     | TW I - 2026**    | Pertumbuhan (%) |
|----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Tangkap Laut         | 1,585,249        | 1,616,954        | 2.00            |
| Udang                | 59,146           | 60,504           | 2.30            |
| Tuna                 | 80,962           | 80,581           | -0.47           |
| Cakalang             | 107,374          | 99,916           | -6.95           |
| Tongkol              | 148,492          | 159,492          | 7.41            |
| Lainnya              | 1,189,274        | 1,216,461        | 2.29            |
| Tangkap PUD          | 114,579          | 116,871          | 2.00            |
| Udang                | 4,727            | 4,075            | -13.81          |
| Ikan                 | 108,741          | 111,245          | 2.30            |
| Lainnya              | 1,111            | 1,551            | 39.61           |
| <b>Total Tangkap</b> | <b>1,699,828</b> | <b>1,733,825</b> | <b>2.00</b>     |

Sumber data: Pusat Data dan Informasi, KKP (11 April 2026)